

BAB I

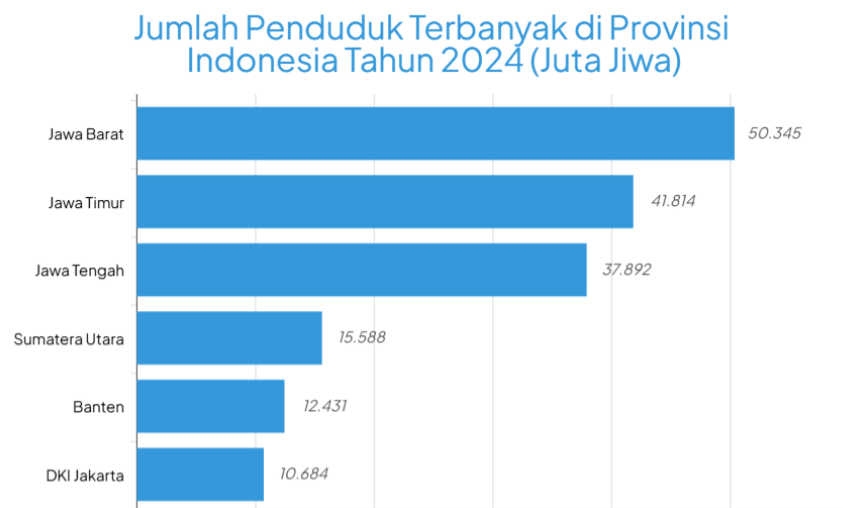
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah yang belum teratasi dalam proses pembangunan di tingkat nasional maupun regional. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok seperti sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan prospek pekerjaan yang layak (Nurjaya & Manulu, 2022). Kemiskinan bersifat struktural karena dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan aset, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap sistem ekonomi formal, sehingga menciptakan kondisi ketergantungan dan kerentanan yang berlangsung dalam jangka panjang (Ema Marsitadewi & Sudemen, 2024). Dalam konteks pembangunan daerah, kemiskinan sering kali terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor primer dengan produktivitas rendah dan fluktuasi pendapatan yang tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kondisi ini menempatkan Jawa Barat pada posisi yang strategis dalam pembangunan nasional, namun di sisi lain juga membawa tantangan tersendiri, mulai dari penyediaan layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga upaya pengentasan kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan persoalan kemiskinan di Jawa Barat bersifat kompleks dan beragam antar wilayah (Sembiring & Tumangkeng, 2023). Ketimpangan pembangunan antara kawasan

perkotaan dan perdesaan menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Barat, wilayah perdesaan pada umumnya masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur ekonomi, minimnya akses terhadap pasar, serta terbatasnya peluang usaha produktif yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin di perdesaan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri, sehingga mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang bersifat struktural dan berkelanjutan (Anom & Hendayana, 2025).



Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk Terbanyak di Provinsi Indonesia Menurut BPS Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2024

Data jumlah penduduk menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2024, yakni mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Kondisi ini menempatkan Provinsi Jawa Barat pada posisi rentan dalam pembangunan sosial ekonomi. Jumlah penduduk yang besar tidak hanya mencerminkan potensi sumber daya manusia,

tetapi juga menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja, pelayanan publik, dan distribusi kesejahteraan (Cholid, 2010). Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, maka resiko meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi semakin besar, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran (Syafirah & Idris, 2025).

Tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat berdampak langsung pada dinamika kemiskinan di tingkat kabupaten atau kota, di mana daerah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dan informal cenderung mengalami kesulitan dalam menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat hanya bergantung pada pekerjaan berpendapatan rendah dan tidak stabil yang memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga (Rahman, 2025). Namun, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari urgensi pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pendekatan pembangunan yang berfokus pada sektor formal dan peran pemerintah saja masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara menyeluruh. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu upaya strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi berbagai permasalahan sosial ekonomi yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk (Murdiansyah, 2014).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha berskala mikro hingga menengah yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok usaha kecil. UMKM meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti

perdagangan, produksi, jasa, dan industri kreatif, yang umumnya ditandai dengan keterbatasan modal, sistem pengelolaan yang sederhana, serta pengelolaan usaha yang masih didominasi oleh pemilik atau anggota keluarga (Utami et al., 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja serta menyediakan layanan ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. UMKM juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan yang merata, dan stabilitas nasional. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pendorong inovasi, dan penggerak utama ekonomi kerakyatan (Lubis & Salsabila, 2024).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menekankan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam bentuk pembukaan kesempatan, dukungan, perlindungan, maupun pengembangan yang menyeluruh. Hal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha ekonomi rakyat, dengan tetap memperhatikan peran dan kontribusi Usaha Besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan, sehingga upaya pemberdayaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Undang-undang ini mendefinisikan pemberdayaan UMKM sebagai upaya yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan

masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mengembangkan UMKM menjadi usaha yang kuat dan mandiri, dengan berlandaskan pada prinsip kemandirian, jiwa kewirausahaan, kebersamaan, dan peningkatan daya saing. Selain itu, UU ini mengatur berbagai aspek strategis pemberdayaan, mulai dari pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, perizinan, hingga promosi dan dukungan kelembagaan, yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas aktor.

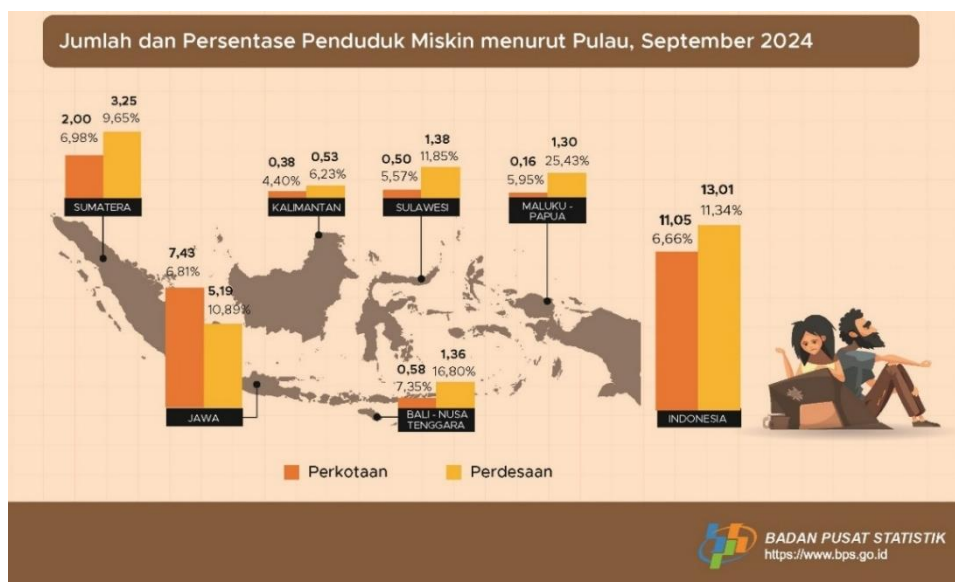
Dilansir dalam berita niaga.asia (24/08/2024) UMKM diposisikan sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional karena perannya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi rakyat melalui kontribusinya yang signifikan terhadap PDB dan ekspor nonmigas.

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51 persen. Tidak hanya itu, UMKM turut memberikan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,92 persen. Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Dengan jumlah tersebut, UMKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 15,65 persen.”

(Sumber: <https://www.niaga.asia/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-indonesia-6051-persen-dan-serap-9692-tenaga-kerja/>) Diakses pada tanggal 19 Februari 2026.

Berita tersebut menegaskan bahwa UMKM sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Selain kontribusinya terhadap perekonomian daerah, penguatan sektor UMKM memiliki hubungan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Arifa & Panggabean, 2025).

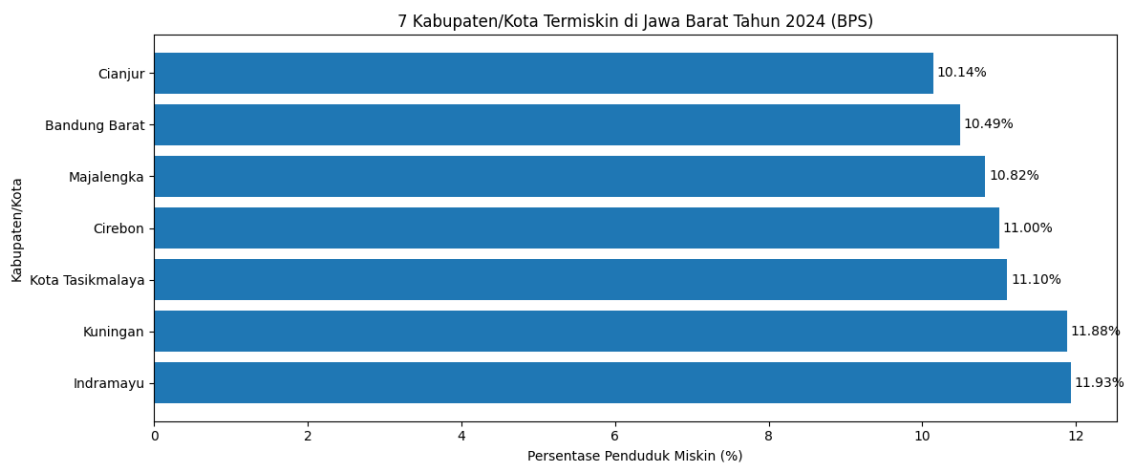
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa masih tercatat sekitar 7,43 persen di wilayah perkotaan dan 5,19 persen di wilayah perdesaan. Walaupun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi antarwilayah masih tampak jelas, khususnya di kawasan pesisir dan perdesaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga sebagian kelompok masih belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.



Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Indonesia tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2024

Kabupaten Indramayu menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2024, persentase kemiskinan di Indramayu mencapai 11,93 persen. Meskipun menunjukkan penurunan dari 12,13 persen pada tahun 2023, penetapan Indramayu sebagai salah satu lokus pengentasan kemiskinan di Jawa Barat mencerminkan keadaan yang masih kritis dan memerlukan penanganan yang serius.



Gambar 1. 3 Data Persentase Kabupaten/Kota termiskin di Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2024

Mengingat struktur kemiskinan yang kompleks di Indramayu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pengembangan UMKM yang berorientasi pada potensi lokal terbukti mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan karakteristik perekonomian Indramayu yang bertumpu pada hasil laut, pertanian, dan produk lokal. Namun, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal,

terutama karena kurangnya pendampingan intensif, minimnya inovasi produk, serta masih rendahnya akses pasar dan digitalisasi di kalangan pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi salah satu regulasi yang mendukung penguatan peran UMKM melalui berbagai kebijakan yang mencakup kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha. Peraturan ini memberikan kemudahan dalam proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, mempermudah pengurusan legalitas usaha, serta mendorong sertifikasi dan standardisasi produk agar UMKM memiliki daya saing yang lebih baik. Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk melalui program inkubasi bisnis, pengembangan kemitraan usaha, serta penyediaan akses pembiayaan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan usaha yang mandiri, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pemerataan perekonomian.

Pemberdayaan UMKM di tingkat daerah memegang peran penting dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. UMKM menjadi sektor ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, karena mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan berkontribusi besar terhadap pendapatan rumah tangga di berbagai wilayah. Melalui proses pemberdayaan yang terarah, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat kualitas dan daya saing produk, serta memperluas akses pasar. Selain itu, penguatan UMKM juga mendorong kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi terhadap dinamika ekonomi, termasuk perubahan teknologi dan tantangan ekonomi global,

sehingga UMKM dapat berperan lebih optimal sebagai penggerak ekonomi lokal. Upaya pemberdayaan di daerah menekankan optimalisasi potensi lokal serta kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat (Suci, 2017). Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang mampu menjaga stabilitas ketika terjadi krisis ekonomi nasional (Nurhidayanti, 2025).

Pemberdayaan yang dirancang secara berkelanjutan membantu pelaku UMKM mengelola potensi daerah secara produktif, seperti sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal memungkinkan terbentuknya aktivitas ekonomi yang lebih memiliki nilai tambah yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya kearifan lokal, serta kapasitas masyarakat setempat, proses pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi lokal.

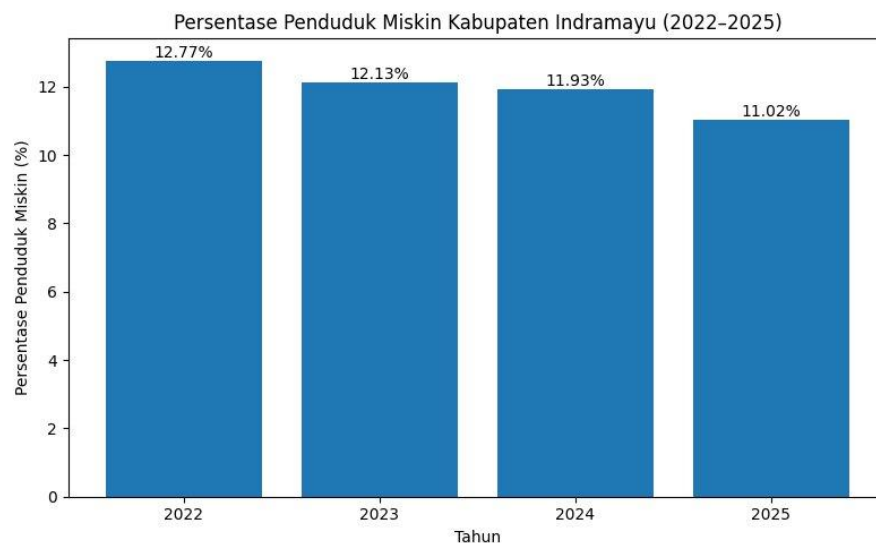
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2022 merupakan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Perda ini menegaskan kembali kewajiban pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM melalui berbagai bentuk dukungan, seperti penyederhanaan perizinan, penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan kemitraan dan jaringan pemasaran. Perda ini merupakan wujud dari pemahaman bahwa pemberdayaan UMKM merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Perda ini juga

menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga pengembangan UMKM diarahkan untuk berjalan secara berkelanjutan dan bertumpu pada potensi lokal yang ada.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah di tengah kemajuan teknologi dan integrasi pasar global. Transformasi digital mendorong pelaku UMKM untuk menguasai teknologi informasi dan memanfaatkan media sosial serta e-commerce sebagai sarana pemasaran dan promosi. Melalui pelatihan dan pendampingan digital, pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jaringan pelanggan, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak hanya soal peningkatan modal atau produksi, tetapi juga tentang adaptasi terhadap perubahan zaman dan inovasi berkelanjutan (Kamariani et al., 2025). Selain berdampak ekonomi, pemberdayaan UMKM juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kegiatan usaha mikro dan kecil memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui pemberdayaan, masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan, jaringan usaha, serta sumber permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dampak sosial ini memperkuat rasa kemandirian, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan di tingkat lokal.

Keberhasilan program pemberdayaan UMKM di daerah sangat bergantung pada kolaborasi antaraktor (Hayatika et al., 2021). Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan, infrastruktur, serta dukungan teknis bagi pelaku UMKM. Sementara itu, lembaga swasta turut berkontribusi melalui pelatihan, riset, dan pengembangan teknologi. Sinergi antara sektor publik

dan sektor swasta berperan penting dalam membentuk ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga pengembangan UMKM tidak semata bergantung pada bantuan pemerintah. Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi penguatan kapasitas pelaku usaha melalui penyediaan pelatihan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan jejaring bisnis yang lebih luas. Dengan dukungan yang terintegrasi, pelaku UMKM terdorong untuk tumbuh secara mandiri dan adaptif, yang pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya sistem ekonomi daerah yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal.. Pemberdayaan yang berbasis partisipasi masyarakat memperkuat kepercayaan diri dan keterlibatan warga dalam pembangunan (Nauval et al., 2023).



Gambar 1.4 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar diagram tersebut memperlihatkan tren penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu selama periode 2022–2025, dari 12,77 persen pada tahun 2022 menjadi 11,02 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dijalankan.

Namun demikian, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu masih berada pada tingkat yang paling tinggi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu tidak dapat hanya bergantung pada campur tangan pemerintah yang bersifat sementara. Namun, efektivitas pemberdayaan UMKM sangat ditentukan oleh adanya pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan pelaku UMKM secara sinergis (Wardana et al., 2023a). Oleh karena itu, penerapan collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM menjadi pendekatan strategis yang berpotensi memberikan kontribusi lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan (Suhendar & Salidja, 2021). Keberadaan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi yang produktif. Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 201.759 pelaku UMKM yang menjalankan usaha di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan pengolahan hasil perikanan. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten

Indramayu. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu, baik sebagai sumber mata pencaharian masyarakat maupun sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Berikut jumlah data pelaku UMKM tahun 2024 pada tiap kecamatan Indramayu :

Tabel 1.1 Data keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Indramayu

No	KECAMATAN	TOTAL PELAKU UMKM
1	Anjatan	7.097
2	Arahan	2.489
3	Balongan	5.106
4	Bangodua	2.323
5	Bongas	12.342
6	Cantigi	6.855
7	Cikedung	3.374
8	Gabus Wetan	4.479
9	Gantar	4.048
10	Hargeulis	10.142
11	Indramayu	24.405
12	Jatibarang	5.248
13	Juntinyuat	8.340
14	Kandanghaur	4.529
15	Karangampel	8.918
16	Kedokan Bunder	3.962
17	Kertasemaya	4.715
18	Krangkeng	4.216
19	Kroya	5.420
20	Lelea	2.755
21	Lohbener	8.293
22	Losarang	5.322
23	Pasekan	3.418
24	Patrol	8.750
25	Sindang	10.453
26	Sliyeg	7.167
27	Sukagumuwang	6.433
28	Sukra	2.675
29	Terisi	6.815
30	Tukdana	5.806
31	Widasari	5.864
TOTAL		201.759

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Indramayu

Penyebaran jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat telah tersebar cukup merata di seluruh kecamatan, meskipun terdapat konsentrasi yang tinggi di wilayah-wilayah tertentu seperti Kecamatan Indramayu, Sindang, dan Bongas. Kecamatan tersebut memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi serta akses terhadap infrastruktur dan pasar yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, wilayah pesisir seperti Kecamatan Juntinyuat, Eretan, dan Karangsong cenderung didominasi oleh UMKM berbasis olahan hasil laut dan olahan pangan lokal yang berpotensi besar dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Secara geografis, sebagian besar pelaku UMKM di Indramayu tersebar di kawasan pesisir seperti Kecamatan Juntinyuat, Eretan, dan Karangsong yang memiliki potensi hasil laut melimpah. Produk olahan ikan, petis, terasi, serta makanan khas daerah menjadi identitas ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kecamatan di wilayah selatan seperti Haurgeulis dan Gantar lebih banyak bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian seperti beras, emping, dan gula semut. Namun demikian, pelaku UMKM di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen usaha, inovasi produk, serta keterbatasan akses terhadap teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Meskipun sektor UMKM di Kabupaten Indramayu menunjukkan pertumbuhan yang positif, berbagai tantangan struktural dan non struktural masih menghambat proses pemberdayaan secara optimal. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan internal pelaku usaha, tetapi juga dari faktor eksternal seperti regulasi, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga yang belum

terintegrasi. Sebagian besar pelaku UMKM di daerah, termasuk di Kecamatan Juntinyuat, masih berorientasi pada produksi tradisional dan penjualan lokal. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu juga berkaitan dengan permodalan dan pemasaran. Meskipun terdapat berbagai program bantuan modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program kredit mesra, tidak semua pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan administrasi dan sistem keuangan yang ditetapkan lembaga perbankan. Akibatnya, sebagian besar UMKM masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. (Novitasari, 2022). Meski menghadapi banyak tantangan, sektor UMKM di Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan komunitas lokal. Ada beberapa program pemberdayaan seperti memfasilitasi dari segi permodalan, membantu perizinan usaha, pendampingan sertifikasi halal, hingga digitalisasi pemasaran. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta juga dilakukan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis kepada pelaku UMKM.

Upaya untuk memperkuat perekonomian lokal, tata kelola kolaboratif menjadi strategi yang efektif untuk memberdayakan UMKM. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama (Mangeka, 2024). Pendekatan kolaboratif memungkinkan terciptanya sinergi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan, yang secara bersama-sama dapat mempercepat pertumbuhan serta keberlanjutan usaha kecil di daerah. Salah satu UMKM olahan hasil laut yang menonjol adalah UMKM

Bang Pilo, yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat produk unggulan daerah Kabupaten Indramayu. Adanya program Pengembangan Pindang Lombang ini dan dikembangkan mulai pada tahun 2023. Pelaku usaha yang bergerak di bidang olahan makanan ikan khas daerah dan produk kreatif berbasis potensi lokal. Usaha ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi produktif seperti pengemasan, distribusi, dan promosi. Bang Pilo menjadi representasi dari model pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah dan lembaga swasta. Melalui pendekatan ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan pembentukan jejaring sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Dilansir dalam berita kacenews.id (18/07/2024) upaya pemberdayaan UMKM Bang Pilo tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga menekankan pada proses penguatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pendampingan. Pendekatan ini tercermin dalam keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT Polytama yang diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis tradisi dan sumber daya desa.

“Melalui program ini, Polytama Propindo berupaya pengembangan potensi ikan pindang sebagai tradisi kuliner yang ada di desa. Dalam pengembangannya, program Bang Pilo dilakukan melalui pelatihan wirausaha sebagai salah satu pondasi dalam pembentukan kelompok usaha masyarakat. Agar UMKM bergerak lebih maju, para pelaku usaha pindang di Desa Lombang yang semula masih bergerak secara tradisional, maka dilakukan pendampingan usaha melalui program Bang Pilo ini.”

(Sumber : <https://www.kacenews.id/2024/07/18/ketenaran-bang-pilo-kian-menyala-produk-desa-yang-merambah-mancanegara/>) Diakses pada tanggal 09 November 2025.

Di Kabupaten Indramayu, penerapan prinsip *Collaborative governance* mulai tampak dalam berbagai inisiatif pemerintah daerah yang berfokus pada pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan kebijakan, program pembinaan, serta dukungan kelembagaan bagi UMKM. Pemerintah memiliki kewenangan strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya pendukung. Peran tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci dalam memastikan bahwa proses pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sementara itu, PT Polytama Propindo berperan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Peran sektor swasta difokuskan pada pendampingan pelatihan usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya dan kearifan masyarakat pesisir. Kehadiran sektor swasta diharapkan mampu melengkapi peran pemerintah, khususnya dalam aspek sumber daya, inovasi, dan keberlanjutan program. Selanjutnya, pelaku UMKM Bang Pilo yang merupakan subjek utama dalam proses kolaborasi. Pelaku UMKM berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pelaksana langsung kegiatan pemberdayaan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk pindang.

UMKM Bang Pilo di Kecamatan Juntinyuat menjadi salah satu contoh konkret penerapan model kolaboratif ini. Usaha ini bergerak dalam bidang olahan makanan khas pesisir, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja

utama. Melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu dengan PT Polytama, Bang Pilo mendapatkan pendampingan terkait peningkatan kualitas produksi, legalitas usaha, serta strategi pemasaran berbasis digital. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak swasta dalam bentuk program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk inovatif berbasis potensi lokal.

Penelitian mengenai *Collaborative governance* dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian (Elani et al., 2025) yang menggambarkan bagaimana pemerintah Kecamatan Kedungbanteng bersama Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (ASPIKMAS) dan Bank Indonesia membangun kolaborasi formal untuk memperkuat kapasitas UMKM. Dalam penelitian tersebut, kolaborasi berlangsung melalui struktur kelembagaan yang jelas, adanya pembagian peran, serta program-program pendampingan dan pelatihan yang dirancang secara sistematis. Sementara itu, penelitian oleh (Mangeka, 2024) menegaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dapat dicapai melalui kemitraan yang terstruktur antara pemerintah dan perusahaan swasta. Dalam konteks Kabupaten Berau, kolaborasi tersebut dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Setiap tahapan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi yang terencana, dan menunjukkan bahwa proses kolaboratif mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan terarah.

Berbagai kajian mengenai *collaborative governance* dan pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan

strategis yang efektif dalam memperkuat ekonomi lokal serta mendorong penurunan angka kemiskinan melalui sinergi peran antaraktor pembangunan. Secara teoretis, *collaborative governance* dipahami sebagai suatu mekanisme tata kelola yang menekankan penyatuan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas dari berbagai aktor untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, termasuk dalam pengembangan UMKM sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Namun, *collaborative governance* masih diposisikan secara normatif sebagai pendekatan ideal yang mengasumsikan adanya keselarasan peran, integrasi program, serta koordinasi yang berjalan efektif sejak tahap awal proses kolaborasi, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan kompleksitas dan dinamika kolaborasi dalam praktik di lapangan.

Keterbatasan teoritis tersebut semakin terasa ketika diterapkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan struktur ekonomi yang didominasi sektor primer dan informal, sebagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keadaan ini menuntut adanya strategi kolaboratif yang tidak hanya kokoh secara teoritis, tetapi juga dapat disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi lokal serta keterbatasan struktural. Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak perekonomian, tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir dan perdesaan mengindikasikan bahwa keberadaan UMKM serta berbagai program pemberdayaan yang dijalankan belum secara otomatis mampu menghasilkan dampak pengurangan kemiskinan yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini mengungkap gap teoritis, yaitu belum kuatnya penjelasan konseptual mengenai bagaimana *collaborative governance* bekerja dalam konteks pemberdayaan UMKM

di wilayah dengan keterbatasan struktural, ketimpangan kapasitas ekonomi, serta kompleksitas persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional.

Secara fenomenologis, penetapan UMKM Bang Pilo sebagai salah satu dari empat produk unggulan daerah Kabupaten Indramayu merefleksikan adanya pengakuan terhadap potensi ekonomi lokal yang dimilikinya. Namun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur usaha yang memadai, sebagaimana dukungan yang diterima oleh produk unggulan daerah lainnya, sehingga pengembangan usaha belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara status Bang Pilo sebagai produk unggulan daerah dengan kapasitas pendukung usaha yang tersedia, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Keterbatasan sarana produksi, pengolahan, pengemasan, serta infrastruktur pendukung lainnya berimplikasi pada rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha, meskipun Bang Pilo memiliki nilai ekonomi dan identitas lokal yang kuat.

Fenomena tersebut mencerminkan gap fenomena, yaitu adanya jarak antara kebijakan penetapan produk unggulan daerah dengan realitas implementasi pemberdayaan UMKM di lapangan. Di satu sisi, Bang Pilo diposisikan sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal, namun di sisi lain, dukungan konkret yang bersifat terintegrasi dan berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM belum berjalan sebagai suatu proses kolaboratif yang mampu menyinergikan peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan pelaku UMKM secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana collaborative governance dapat

diterapkan dalam konteks UMKM unggulan daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, guna menjembatani kesenjangan antara potensi, kebijakan, dan capaian pemberdayaan UMKM Bang Pilo secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan utama terkait bagaimana bentuk *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM Bang Pilo Kecamatan Juntinyuat sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Indramayu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM Bang Pilo Kecamatan Juntinyuat sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai penerapan tata kelola kolaboratif dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya terkait pengembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam bidang administrasi publik serta menunjukkan pentingnya keterlibatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola partisipatif

sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh pemerintah daerah..

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam memperkuat program pemberdayaan UMKM berbasis kolaboratif. Temuan penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kapasitas UMKM yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik yang menyangkut tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan UMKM. Di samping memperkaya literatur yang sudah ada, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pola kemitraan dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat berperan dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM

secara kolaboratif. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pemberdayaan UMKM dalam mendorong kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penguatan UMKM di daerah.